

## **ABSTRAK**

### **DESKRIPSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**

**(Studi kasus Pengadilan Negeri Kupang)**

**Winnie Lorianchy Nubatonis (21310029)**

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (1). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana Korupsi dana BOS serta alasan yuridis mengapa pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 tidak dapat digunakan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah, sedangkan pasal 3 dapat diterapkan (2). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan, yang mengandalkan data sekunder berupa putusan pengadilan dan literatur hukum (3). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait kasus korupsi dana BOS (4). Dari putusan tersebut, terungkap bahwa pelaku memanfaatkan kekuasaan dan jabatannya sebagai kepala sekolah untuk menyalahgunakan dana BOS demi kepentingan pribadi, seperti membiayai kepentingan anak, urusan adat, gaya hidup mewah, pembelian Iphone, dan konsumsi minuman beralkohol (5). Kesimpulan utama dari tujuan utama penelitian ini adalah Pasal 2 ayat (1) tidak dapat digunakan karena tidak semua unsur dalam pasal tersebut terpenuhi dalam dakwaan (6). Sementara itu, Pasal 3 dapat diterapkan karena seluruh unsure dalam pasal tersebut terpenuhi (7). Dengan demikian penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana BOS lebih tepat dilakukan berdasarkan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999.

***Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Dana BOS***

## **ABSTRACT**

### **AN ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPERATORS OF CORRUPTION IN THE SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE FUND**

**(A Case Study at the Kupang District Court)**

**Winnie Lorianchy Nubatonis (21310029)**

This research discusses law enforcement against perpetrators of corruption involving the School Operational Assistance Fund (BOS) (1). The main objective is to identify the factors causing the corruption of BOS fund and the legal reasons why article 2 paragraph (1) of Law number 31 of 1999 cannot be used to impose penalties on the perpetrators, while article 3 can be applied (2). This study employs a normative legal research method using a literature-based approach, relying solely on secondary data such as court decisions and legal literature (3). The result indicates that five final and binding court decisions were identified involving BOS fund corruption cases (4). The findings reveal that the perpetrators, typically school principals, abused their power and position to misappropriate BOS funds for personal interests, including their children's education, traditional obligations, a luxurious lifestyle, purchasing iPhones, and consuming alcoholic beverages with friends (5). Article 2 paragraph (1) was deemed inapplicable due to the failure to meet all required legal elements in the indictment (6). Conversely, article 3 could be applied as all its elements were fulfilled in the perpetrator's actions (7). Therefore, legal enforcement against BOS fund corruption is more appropriately based on Article 3 Of Law Number 31 of 1999 (8).

***Keywords :*** *Law enforcement, Corruption, BOS Funds*